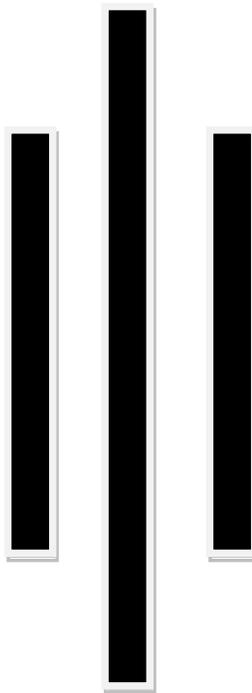




**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
( RKT )  
TAHUN 2023**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esaan / Ida Sang Hyang Widhi WaÇa karena atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, buku Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 dapat diselesaikan penyusunannya.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai penjabaran dari Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Tahunan OPD Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana diharapkan dapat digunakan :

1. Acuan Kerja Pelaksana Kegiatan bagi Aparatur dalam melaksanakan tugas agar lebih terarah, realistis dan terpadu
2. Acuan bagi semua Stakeholder yang berkepentingan terhadap pengembangan bidang pendapatan, pengeloan keuangan dan aset daerah.
3. Acuan dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring, berbagai program pengembangan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

Diharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan bertanggung jawab pada kemajuan dibidang pengembangan dibidang pendapatan , pengeloan keuangan dan aset daerah dapat mendukung pelaksanaan renja OPD ini secara konsisten sesuai dengan peran dan misi masing masing.

Semoga Rencana Kerja Tahunan OPD yang telah disusun ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Negara, 5 Maret 2022

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Jembrana,



**I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si**

Nip. 19691119 199603 1 006

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6

### BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

2.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi .....	7
2.2 Sumber Daya .....	9

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran RKT OPD Tahun 2023.....	13
3.2 Program dan Rencana Kerja Tahun 2023.....	14

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>28</b>
----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berkaitan dengan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan OPD, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam hal ini Kabupaten Jembrana memenuhi ketentuan tersebut dengan menyusun RPJMD tahun 2021-2026. RPJMD ini akan menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026.

Untuk mengarah terwujudnya upaya pencapaian visi dan misi perlu adanya penyusunan Rencana Kerja (RKT) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode (1) satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Penyusunan dan perumusan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana kerja (RKT ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang definitive. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RKT mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan RKT dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu

terhadap kondisi eksisting Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, evaluasi pelaksanaan RKT pada tahun – tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun Rencana Kerja OPD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Visi, misi dan arah Kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
2. Kewenangan organisasi sebagaimana tercantum dalam Perda Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016.
3. Tugas Pokok dan fungsi organisasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Kondisi internal organisasi yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), perlengkapan, anggaran, serta metode kerja.
5. Kondisi eksternal organisasi yang meliputi kebijakan bidang pajak daerah / retribusi daerah, perekonomian dan hubungan kerja antar OPD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai OPD maupun selaku SKPKD mempunyai kewajiban memberikan kontribusi terhadap tercapainya visi Kabupaten Jembrana tahun 2021-2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 ini, Sejumlah Peraturan digunakan sebagai acuan, antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  - e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
  - f. Undan-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5679);

- h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Ngera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5494);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana;
- r. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (RKT OPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana.
2. Menyediakan satu tolok ukur bagi pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan OPD (RKT OPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2023, merupakan penjabaran dari Rencana strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana dalam suatu Dokumen Perencanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 5 (lima) Tahun sejak 2021 sampai dengan tahun 2026.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan OPD (RKT OPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 adalah sebagai berikut: :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang penyusunan RKT OPD, Dasar Hukum Penyusunan, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahunan OPD (RKT OPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023.

##### **BAB II. GAMBARAN UMUM BDAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.**

Memuat Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Sumber Daya yang mencakup Kondisi Lingkungan Internal dan Kondisi Lingkungan Eksternal

##### **BAB II. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.**

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran serta uraian garis besar mengenai program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahunan OPD (RKT OPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023.

##### **BAB IV. P E N U T U P**

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN JEMBRANA**

**2.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.**

2.1.1 Tugas Pokok.

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Tugas Pokok “ Melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

2.1.2 Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana mempunyai Fungsi.

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksana administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugas dan fungsinya.

2.1.3 Susunan Organisasi.

Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 1 orang Kepala Badan, 1 Orang Sekretaris, 6 Orang Kepala Bidang, 3 Orang Kepala Sub Bagian, 18 orang Kepala Sub Bidang, dan kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan Struktur Organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat terdiri :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Program dan Pelaporan, dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pajak PBB P2 dan BPHTB, terdiri :
  1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak PBB P2 dan BPHTB.
  2. Sub Bidang Penetapan PBB P2 dan BPHTB.
  3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan PBB P2 dan BPHTB.
- d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri :
  1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah lainnya.
  2. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah lainnya.
  3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah Lainnya.
- e. Bidang Anggaran, terdiri :
  1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan.
  2. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung.
  3. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung.
- f. Bidang Perbendaharaan, terdiri :
  1. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Non Gaji.
  2. Sub Bidang Belanja Langsung.
  3. Sub Bidang Belanja Gaji.
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri :
  1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
  2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Belanja Daerah.
  3. Sub Bidang Laporan Belanja Daerah.
- h. Bidang Aset, terdiri :
  1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset.
  2. Sub Bidang Penatausahaan Persediaan dan Aset Lain-lain.
  3. Sub Bidang Penatausahaan Aset Tetap.

## **2.2 Sumber daya**

### **a. Kondisi Lingkungan Internal**

Beberapa faktor internal yang merupakan sumber daya organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ada saat ini adalah sebagai berikut:

#### **1) Kepegawaian.**

Jumlah pegawai yang bekerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah saat ini adalah 110 orang yang terdiri dari PNS 57 orang, tenaga kontrak 54 orang. Dari jumlah itu dapat dirinci pegawai laki – laki sebanyak 70 orang dan 40 orang adalah pegawai wanita.

Kondisi di atas memberikan gambaran bahwa dari sisi jumlah maupun jenjang pendidikan. Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bisa diartikan masih diperlukan jenjang pendidikan yang memadai guna meningkatkan SDM yang mumpuni

#### **2) Keuangan.**

Anggaran keuangan merupakan penunjang utama dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi. Secara umum dukungan anggaran untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama ini sudah mencukupi.

#### **3) Sara Kerja/ Bahan Kerja.**

Dalam melaksanakan kegiatan didukung dengan ketersediaan bahan yang cukup meliputi peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai dasar hukum, kebijakan maupun peralatan kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

#### **4) Metode Kerja.**

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan seluruhnya didasarkan pada metode baku sebagai pedoman kerja. Metoda kerja yang diharapkan meliputi prosedur pembakuan tetap atau standart pelayanan minimum serta pola koordinasi intern dan antar

lembaga sudah berjalan dengan baik koordinasi antar dinas/ OPD dalam Pembuatan SIMDA Gaji, SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang, Aplikasi PBB dan Aplikasi BPHTB.

#### 5) Perlengkapan

Perlengkapan atau sarana dan prasarana kerja sebagai pendukung terlaksananya kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari prasarana gedung, alat angkutan, mebelair, perlengkapan lainnya serta alat komunikasi semuanya tersedia dengan cukup dan dapat berfungsi untuk kelancaran operasional organisasi / lembaga

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

##### 1. Kepegawaian

- Profesionalisme Pegawai Belum Memadai.
- Penempatan pegawai belum sesuai dengan keahlian.
- Kedisiplinan pegawai cukup.
- Pengembangan karier yang tidak jelas.
- Tingkat kejenuhan pegawai dalam bekerja tinggi.
- Belum adanya penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.
- Pemahaman tugas pokok personalia belum mantap

##### 2. Metode Kerja

- Belum adanya networking data pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset
- Belum adanya standart ukuran kinerja

##### 3. Perlengkapan

- Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal.
- Tranformasi ilmu dan teknologi moderen belum memadai.
- Pemahaman perawatan perlengkapan belum optimal.

#### 4. Kebijakan Pemerintah.

- Perlakuan terhadap wajib pajak yang patuh belum jelas.
- Sanksi terhadap para penunggak pajak / retribusi belum efektif.

#### b. Kondisi Lingkungan eksternal.

Kondisi lingkungan eksternal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pencapaian visi dan misi Badan.

Kondisi eksternal dinas apabila dikelola dengan baik akan dapat menjadi peluang, sebaliknya bila tidak dikelola dengan baik akan dapat menjadi hambatan dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Kondisi lingkungan eksternal tersebut mencakup kebijakan pemerintah, peraturan perundang – undangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berupa PDRB, income perkapita, sinkronisasi, sinergi dan koordinasi yang mantab antar dinas serta potensi unggulan.

##### 1) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah baik pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kabupaten dalam bentuk produk hukum dibidang pajak, retribusi, pengelolaan keuangan dan aset sudah cukup memadai

##### 2) Koordinasi Amntar OPD, Lembaga Badan Hukum.

Kondisi dalam berkoordinasi antar dinas, lembaga keuangan dan lembaga badan hukum lainnya sudah dapat berjalan dengan baik namun masih perlu untuk ditingkatkan.

##### 3) Kondisi Wajib Oajak dan wajib Retribusi.

Kondisi wajib pajak dan wajib retribusi di Kabupaten Jembrana dapat dipresentasikan melalui kemampuan ekonomi wajib pajak / wajib retribusi yang cukup baik namun kesadaran untuk

memenuhi kewajiban masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari adanya tunggakan pajak / retribusi yang masih cukup banyak

#### 4) Kondisi Aset.

Aset – aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana sangat banyak maka perlu adanya peningkatan management Aset Daerah

Selanjutnya dengan memanfaatkan kekuatan sumber daya organisasi serta peluang kondisi eksternal yang ada maka kinerja yang telah dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah saat ini adalah :

##### a. Regulasi

Produk hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan pungutan pajak / retribusi, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang telah dibuat baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Surat Keputusan Bupati

##### b. Pelayanan Publik.

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saat ini adalah :

- Penetapan OPD ( surat Ketetapan Pajak Daerah)
- Penetapan Pajak Reklame.
- Pelayanan PBB P2 Online.
- Pelayanan BPHTB Online.
- Pelayanan Pembayaran Tunggakan Pajak.
- Pelayanan Pembayaran Pajak.
- Pelayanan Pendaftaran pajak Daerah

##### c. Advokasi / Aistensi

Peran Advokasi dan asistensi yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap OPD dalam rangka tertib administrasi dan monitoring peningkatan kemampuan keuangan daerah.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1 Tujuan dan Sasaran RKT OPD Tahun 2023**

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Tujuan yang akan dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana dalam tahun 2023 adalah :

- a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel

Setelah ditetapkan tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya ditentukan sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan Sementara menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Adapun sasaran strategis rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2023 adalah :

1. Tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Meningkatnya pendapatan asli daerah

Sasaran diatas menunjukkan adanya korelasi yang saling terkait untuk mendukung tujuan yang sudah ditetapkan.

### **3.2. Program dan Rencana Kerja Tahun 2023**

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**MATRIK BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2024**

Kode	Gabung	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	Lokasi	Tahun 2023		Prakiraan Maju			Keterangan	OPD	
		<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana</b>					<b>144,865,812,720</b>			<b>144,865,812,720</b>		
X.XX	4						8,916,975,168			8,916,975,168		
X.XX.01	7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai/Predikat LKjIP PD		80	Nilai	8,916,975,168	80	Nilai	8,916,975,168		
X.XX.01.2.01	12	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	%	81,902,000	100	%	81,902,000		
X.XX.01.2.01.01	15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	7	Dokumen	20,000,000	7	Dokumen	20,000,000		BPKAD

X.XX.01.2.01.06	15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD Kab.Jembrana	6	Laporan	53,902,000	6	Laporan	53,902,000		BPKAD
X.XX.01.2.01.07	15	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	5	Laporan	8,000,000	5	Laporan	8,000,000		BPKAD
X.XX.01.2.02	12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah		100	%	7,799,623,648	100	%	7,799,623,648		
X.XX.01.2.02.01	15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab.Jembrana	49	Orang/bulan	7,730,363,648	49	Orang/bulan	7,730,363,648		BPKAD
X.XX.01.2.02.04	15	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD Kab.Jembrana	3	Dokumen	50,000,000	3	Dokumen	50,000,000		BPKAD
X.XX.01.2.02.05	15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD Kab.Jembrana	5	Laporan	19,260,000	5	Laporan	19,260,000		BPKAD

X.XX.01.2.05	12	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		100	%	35,109,700	100	%	35,109,700		
X.XX.01.2.05.02	15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BPKAD Kab.Jembrana	49	Paket	35,109,700	49	Paket	35,109,700		BPKAD
X.XX.01.2.06	12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah		100	%	548,326,500	100	%	548,326,500		
X.XX.01.2.06.01	15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BPKAD Kab.Jembrana	250	Paket	19,740,000	250	Paket	19,740,000		BPKAD
X.XX.01.2.06.04	15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPKAD Kab.Jembrana	47	Paket	154,106,500	47	Paket	154,106,500		BPKAD
X.XX.01.2.06.05	15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BPKAD Kab.Jembrana	856	Paket	45,600,000	856	Paket	45,600,000		BPKAD
X.XX.01.2.06.09	15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD Kab.Jembrana	410	Laporan	285,880,000	410	Laporan	285,880,000		BPKAD

X.XX.01.2.06.11	15	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD Kab.Jembrana	2	Dokumen	43,000,000	2	Dokumen	43,000,000		BPKAD
X.XX.01.2.08	12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah		100	%	42,810,000	100	%	42,810,000		
X.XX.01.2.08.01	15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD Kab.Jembrana	500	Laporan	13,360,000	500	Laporan	13,360,000		BPKAD
X.XX.01.2.08.02	15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPKAD Kab.Jembrana	12	Laporan	29,450,000	12	Laporan	29,450,000		BPKAD
X.XX.01.2.09	12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		100	%	409,203,320	100	%	409,203,320		
X.XX.01.2.09.01	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BPKAD Kab.Jembrana	1	Unit	37,500,000	1	Unit	37,500,000		BPKAD

X.XX.01.2.09.02	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPKAD Kab.Jembrana	14	Unit	133,160,720	14	Unit	133,160,720	BPKAD
X.XX.01.2.09.06	15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BPKAD Kab.Jembrana	65	Unit	50,500,000	65	Unit	50,500,000	BPKAD
X.XX.01.2.09.09	15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPKAD Kab.Jembrana	3	Unit	158,042,600	26	Unit	158,042,600	BPKAD
X.XX.01.2.09.11	15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPKAD Kab.Jembrana	20	Unit	30,000,000	20	Unit	30,000,000	BPKAD
5.02	4	KEUANGAN					135,948,837,552			135,948,837,552	
5.02.02	7	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tersedianya dokumen APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya (Dokumen)		28	dokumen	132,799,509,052	28	dokumen	132,799,509,052	

5.02.02.2.01	12	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya dokumen APBD, perubahan APBD, KUA PPAS Induk, KUA PPAS Perubahan, RKA Induk, RKA Perubahan, DPA Induk, dan DPA Perubahan		28	dokumen	1,338,440,350	28	dokumen	1,338,440,350		
5.02.02.2.01.01	15	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	BPKAD Kab.Jembrana	100	Dokumen	74,999,600	100	Dokumen	74,999,600		BPKAD
5.02.02.2.01.02	15	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	BPKAD Kab.Jembrana	100	Dokumen	74,999,900	100	Dokumen	74,999,900		BPKAD
5.02.02.2.01.03	15	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	15,000,000	40	Dokumen	15,000,000		BPKAD
5.02.02.2.01.04	15	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	14,999,800	40	Dokumen	14,999,800		BPKAD
5.02.02.2.01.05	15	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	15,000,000	40	Dokumen	15,000,000		BPKAD
5.02.02.2.01.06	15	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	14,999,800	40	Dokumen	14,999,800		BPKAD

5.02.02.2.01.07	15	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kab.Jembrana	100	Dokumen	537,873,200	100	Dokumen	537,873,200		BPKAD
5.02.02.2.01.08	15	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kab.Jembrana	100	Dokumen	562,976,750	100	Dokumen	562,976,750		BPKAD
5.02.02.2.01.09	15	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD Kab.Jembrana	10	Dokumen	27,591,300	10	Dokumen	27,591,300		BPKAD
5.02.02.2.02	12	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersedianya Dokumen pengelolaan perbendaharaan Daerah		8	dokumen	201,395,400	8	dokumen	201,395,400		
5.02.02.2.02.01	15	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	23,160,500	40	Dokumen	23,160,500		BPKAD
5.02.02.2.02.03	15	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	19,570,000	40	Dokumen	19,570,000		BPKAD

5.02.02.2.02.04	15	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen	16,810,200	1	Dokumen	16,810,200		BPKAD
5.02.02.2.02.05	15	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD Kab.Jembrana	12	Dokumen	26,868,800	12	Dokumen	26,868,800		BPKAD
5.02.02.2.02.07	15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD Kab.Jembrana	12	Laporan	15,408,100	12	Laporan	15,408,100		BPKAD

5.02.02.2.02.09	15	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	21,767,500	40	Dokumen	21,767,500		BPKAD
5.02.02.2.02.10	15	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen	17,300,000	1	Dokumen	17,300,000		BPKAD
5.02.02.2.02.11	15	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab.Jembrana	40	Orang	60,510,300	40	Orang	60,510,300		BPKAD
5.02.02.2.03	12	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya dokumen pelaporan keuangan daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		10	dokumen	428,175,300	10	dokumen	428,175,300		
5.02.02.2.03.01	15	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	24,673,400	40	Laporan	24,673,400		BPKAD

5.02.02.2.03.02	15	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	16,326,700	40	Dokumen	16,326,700		BPKAD
5.02.02.2.03.03	15	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	56,356,800	40	Laporan	56,356,800		BPKAD
5.02.02.2.03.04	15	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	20,768,500	40	Laporan	20,768,500		BPKAD
5.02.02.2.03.05	15	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen	101,165,400	1	Dokumen	101,165,400		BPKAD

5.02.02.2.03.06	15	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen	20,910,900	1	Dokumen	20,910,900		BPKAD
5.02.02.2.03.08	15	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen	63,552,400	1	Dokumen	63,552,400		BPKAD
5.02.02.2.03.09	15	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen	77,627,500	1	Dokumen	77,627,500		BPKAD
5.02.02.2.03.10	15	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen	25,191,000	1	Dokumen	25,191,000		BPKAD
5.02.02.2.03.11	15	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab.Jembrana	40	Orang	21,602,700	40	Orang	21,602,700		BPKAD
5.02.02.2.04	12	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Transfer Ke Desa/Desa Adat/ Subak		3	Laporan	130,831,498,002	3	Laporan	130,831,498,002		

5.02.02.2.04.09	15	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		1	Laporan	6,594,595,000	1	Laporan	6,594,595,000		
5.02.02.2.04.10	15	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		3	Laporan	124,236,903,002	3	Laporan	124,236,903,002		BPKAD
5.02.03	7	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah (Dokumen)		11	Dokumen	434,278,600	11	Dokumen	434,278,600		
5.02.03.2.01	12	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun (Dokumen)		11	Dokumen	434,278,600	11	Dokumen	434,278,600		
5.02.03.2.01.01	15	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen	55,219,600	1	Dokumen	55,219,600		BPKAD
5.02.03.2.01.02	15	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen	26,746,000	1	Dokumen	26,746,000		BPKAD
5.02.03.2.01.03	15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen	26,767,000	1	Dokumen	26,767,000		BPKAD
5.02.03.2.01.04	15	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	1	Dokumen	26,800,000	1	Dokumen	26,800,000		BPKAD
5.02.03.2.01.05	15	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	77,220,000	40	Laporan	77,220,000		BPKAD
5.02.03.2.01.06	15	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	26,790,000	40	Laporan	26,790,000		BPKAD

5.02.03.2.01.07	15	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	32,000,000	40	Laporan	32,000,000		BPKAD
5.02.03.2.01.09	15	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	46,940,000	40	Laporan	46,940,000		BPKAD
5.02.03.2.01.10	15	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	40	Dokumen	20,000,000	40	Dokumen	20,000,000		BPKAD
5.02.03.2.01.11	15	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	26,796,000	40	Laporan	26,796,000		BPKAD
5.02.03.2.01.12	15	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	BPKAD Kab.Jembrana	40	Laporan	69,000,000	40	Laporan	69,000,000		BPKAD
5.02.04	7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan potensi pajak daerah (%)		15	%	2,715,049,900	15	%	2,715,049,900		
5.02.04.2.01	12	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tersedianya dokumen laporan pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun (Dokumen)		7	Dokumen	2,715,049,900	7	Dokumen	2,715,049,900		

5.02.04.2.01.02	15	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	2	Dokumen	122,555,900	2	Dokumen	122,555,900		BPKAD
5.02.04.2.01.03	15	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	2	Laporan	327,522,200	2	Laporan	327,522,200		BPKAD
5.02.04.2.01.04	15	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	2	Unit	250,543,500	2	Unit	250,543,500		BPKAD
5.02.04.2.01.06	15	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	2	Laporan	70,989,000	2	Laporan	70,989,000		BPKAD
5.02.04.2.01.09	15	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	2	Layanan	45,936,000	2	Layanan	45,936,000		BPKAD
5.02.04.2.01.10	15	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	BPKAD Kab.Jembrana	2	Dokumen	403,902,500	2	Dokumen	403,902,500		BPKAD
5.02.04.2.01.13	15	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKAD Kab.Jembrana	2	Dokumen	1,493,600,800	2	Dokumen	1,493,600,800		BPKAD

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Catatan Penting**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jembrana dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, mengacu pada Rencana Kerja yang telah disusun . Dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana menetapkan 4 (empat) Program 12 (sebelas) Kegiatan dan 66 (enam puluh lima) sub kegiatan.

#### **4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, maka ditetapkan kebijakan dan program-program dijabarkan menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 Tahun Anggaran.

#### **4.3. Rencana Tindak Lanjut**

Hambatan-hambatan yang dijumpai pada pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pada Tahun Anggaran sebelumnya perlu segera diselesaikan, agar dapat diminimalisir dan tidak menjadi kendala dalam meningkatkan capaian kinerja pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Negara, 5 Maret 2022  
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Jembrana



**I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si**  
NIP. 19691119 199603 1 006